

Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik dalam Papan Nama Jalan dan Gedung di Kota Surakarta

¹Pradana Ricardo, ²Tasya Angelita

¹Magister Ilmu Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,
Universitas Indonesia, Indonesia

²Magister Linguistik, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

¹pradana.ricardo@ui.ac.id

ABSTRACT

Linguistic landscape studies provide information regarding the range of languages used. This is related to efforts to prioritize a language in the public sphere. Indonesia has Law Number 24 of 2009 concerning Flag, Language, and National Emblem, and National Anthem Law. The regulation requires the priority of the Indonesian language, one of which is on the name boards in public spaces. This study will describe the use of language and positional configurations as well as measures in the linguistic landscape in Surakarta city. This type of research is descriptive qualitative. This study uses data in the form of lingual units for street names and buildings of government in Surakarta city. The data collection technique in this study was carried out through Google Maps screenshot on the streets and government buildings sign. The data analysis technique uses the determinant element sorting technique. The method of presenting data analysis uses formal and informal descriptive methods. The results showed that the priority of the Indonesian language in Surakarta city was reflected in the street signboards whose position and size configuration was in accordance with Law Number 24 of 2009. Meanwhile, government building nameplates had a higher position and size configuration.

Keywords: Indonesian Language, Linguistic Landscape, Surakarta

ABSTRACT

Kajian Lanskap linguistik menyajikan informasi mengenai jangkauan penggunaan bahasa. Hal ini terkait dengan upaya untuk memprioritaskan suatu bahasa dalam ruang publik. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya prioritas bahasa Indonesia, salah satunya pada papan nama di ruang publik. Studi ini akan menguraikan penggunaan bahasa dan konfigurasi posisi serta ukurannya dalam bentang linguistik di Kota Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data berupa satuan lingual untuk nama jalan dan bangunan instansi pemerintah di Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tangkapan layar Google Maps pada papan nama jalan dan bangunan pemerintah. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik pilah unsur penentu. Metode penyajian analisis data menggunakan metode deskriptif formal dan informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas bahasa Indonesia di Kota Surakarta tercermin pada papan nama jalan yang konfigurasi posisi dan ukurannya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Sementara itu, papan nama bangunan instansi pemerintah memiliki konfigurasi posisi dan ukuran yang lebih tinggi.

Keywords: Bahasa Indonesia, Lanskap linguistik, Surakarta

PENDAHULUAN

Bahasa memiliki peranan yang sangat penting bagi terlaksananya kehidupan di ruang-ruang publik (Ardhian dan Soemarlani, 2018). Penggunaan bahasa di luar ruang diaktualisasikan dalam penulisan teks-teks di ruang publik. Hal itu digunakan sebagai penanda ruang dan tempat adanya aktivitas manusia di ruang publik. Dalam kajian linguistik, penanda-penanda tersebut dapat dianalisis melalui kajian Lanskap Linguistik (LL).

Menurut Landry dan Bourhis (1997), konsep lanskap linguistik terbatas pada bahasa yang digunakan dalam rambu jalan, reklame, nama jalan, nama tempat, kompleks pertokoan, dan papan nama instansi pemerintahan di suatu wilayah. Kajian lanskap linguistik pada penggunaan bahasa Indonesia di papan nama jalan, nama tempat, kompleks pertokoan, dan papan nama instansi pemerintahan di Kota Surakarta dapat dikaji berdasarkan faktor informasi dan faktor simboliknya. Kajian ini juga akan memberikan informasi terkait bentangan kebahasaan yang digunakan. Artinya, kontestasi bahasa di ruang publik turut menjadi sorotan pada kajian lanskap linguistik. Dengan demikian, kajian ini sangat erat kaitannya dengan pengutamaan bahasa di ruang publik.

Indonesia memiliki produk hukum yang mengatur tentang penggunaan dan pengutamaan bahasa di ruang publik, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Akan tetapi, penggunaan dan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik ternyata masih belum dilaksanakan sepenuhnya karena adanya kontestasi dengan bahasa asing maupun bahasa daerah. Hal itu juga terjadi di Kota Surakarta yang tecermin di dalam penggunaan bahasa pada lanskap linguistiknya.

Penelitian tentang lanskap linguistik sudah pernah dilakukan sebelumnya. penelitian oleh Saefu Zaman dalam jurnalnya pada tahun 2021 dengan judul Lanskap Linguistik Kawasan Kota Tua Jakarta: Kajian Sikap Bahasa yang membahas bahwa penggunaan bahasa pada ruang-ruang publik (lanskap linguistik) merupakan cerminan identitas atau jati diri masyarakat dalam memandang bahasa dan bangsa. Orang akan cenderung menggunakan bahasa yang dianggapnya memiliki prestise lebih tinggi dibandingkan dengan bahasa yang lain. Kota Tua Jakarta merupakan kawasan Jakarta tempo dulu yang dijadikan cagar budaya. Kawasan Kota Tua kaya akan objek lanskap linguistik karena di sana khususnya di museum-museum di Kota Tua, penggunaan bahasanya masih dipelihara dari masa bangunan museum-museum tersebut menjalankan fungsinya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lanskap linguistik dengan penggunaan bahasa di museum-museum di Kota Tua Jakarta sebagai sumber data penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengambil foto penggunaan bahasa pada objek-objek ruang publik di kawasan Kota Tua Jakarta. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan lanskap linguistik di Kawasan Kota Tua Jakarta. Penelitian ini juga bertujuan menggambarkan sikap bahasa masyarakat dan pengelola bangunan museum di kawasan Kota Tua Jakarta.

Penelitian di atas memiliki perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terkait dengan pengutamaan bahasa Indonesia di luar ruang, khususnya studi kasus pada papan nama di Kota Surakarta akan berfokus pada pendeskripsian dan penggambaran situasi kebahasaan di Kota Surakarta. Hal itu akan disesuaikan dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di luar ruang pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Dengan demikian, penelitian ini akan menjabarkan terkait penggunaan bahasa pada papan nama gedung pemerintahan dan nama jalan di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini juga akan mendeskripsikan bagaimana gambaran pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik Kota Surakarta melalui konfigurasi posisional dan ukuran bahasa-bahasa yang digunakan dalam papan nama gedung pemerintahan dan nama jalan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Moleong (2009:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Deskriptif kualitatif digunakan agar mendapatkan hasil penelitian yang cermat, jelas, objektif, dan sistematis.

Penelitian ini menggunakan data berupa satuan lingual pada nama jalan, kompleks pertokoan, dan gedung-gedung instansi pemerintah maupun swasta yang berada di Kota Surakarta. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui proses pengambilan gambar tanda-tanda lanskap bahasa di papan nama jalan dan gedung instansi pemerintah di Kota Surakarta. Pengambilan gambar dilakukan secara virtual melalui tangkapan layar pada laman Google Maps. Teknik analisis data menggunakan teknik pilah unsur penentu. Metode penyajian analisis data menggunakan metode deskriptif formal dan informal. Metode penyajian formal adalah penyajian hasil analisis data dengan menggunakan tanda-tanda dan lambang-lambang (Zaim, 2014: 114).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Jumlah Temuan Papan Nama Gedung dan Jalan di Kota Surakarta

Jenis	Jumlah
Papan Nama Gedung	7
Papan Nama Jalan	5
Total	12

Hasil penelitian menunjukkan adanya geliat bahasa dan aksara ganda yang digunakan pada papan nama gedung dan jalan di Kota Surakarta. Papan nama gedung dan jalan di Kota Surakarta menggunakan bahasa Indonesia dan aksara Jawa sebagai tanda penamaan. Hal ini menahbiskan bahwa keduanya digunakan untuk menonjolkan identitas nasional dan lokal di dalam setiap lanskap linguistik pada ruang-ruang publik Kota Surakarta.

Papan Nama Gedung di Kota Surakarta

Data papan nama gedung di Kota Surakarta yang akan disajikan pada pembahasan ini adalah papan nama SD Negeri 2 Sekip 2 Surakarta, Pasar Depok, SMK Negeri 4 Surakarta, Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta, dan Kantor Kelurahan Pasarkliwon. Berdasarkan hasil pengamatan, papan nama gedung tersebut diuraikan dalam penjelasan berikut ini.

SD Negeri Sekip 2 Surakarta



Gambar 1 Papan Nama SD Negeri Sekip 2 Surakarta

Bahasa yang digunakan pada penanda di SD Negeri Sekip 2 Surakarta adalah monolingual bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf latin disertai dengan aksara Jawa. Berdasarkan fungsinya data yang didapatkan dianalisis berdasarkan kategori fungsi pemakaian bahasanya menurut teori Landry dan Bourhis. Data di atas memuat makna informasi yang menunjukkan tanda kepemilikan bahwa gedung SD Negeri Sekip 2 Surakarta merupakan instansi milik pemerintah. Sementara itu, makna simbolis yang dinampakkan adalah budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa merupakan simbol budaya Jawa yang menunjukkan bahwa gedung tersebut berada di sekitar masyarakat Jawa.

Adapun secara konfigurasi tata urutan, aksara Jawa diletakkan di atas bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penulisan Papan Nama Dengan Aksara Jawa Pada Bangunan Pemerintah Dan Nonpemerintah di Kota Surakarta. Akan tetapi, hal itu tidak sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan konfigurasi tata urut bahasa Indonesia—bahasa daerah—bahasa asing. Sementara itu, konfigurasi ukuran yang digunakan menunjukkan bahwa penggunaan aksara Jawa lebih besar dibandingkan bahasa Indonesia. Hal itu semakin mempertegas kurangnya wujud pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Pasar Depok



Gambar 2 Papan Nama Pasar Depok

Bahasa yang digunakan pada penanda di Pasar Depok, Kota Surakarta adalah monolingual bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf latin disertai dengan aksara Jawa. Berdasarkan fungsinya data yang didapatkan dianalisis berdasarkan kategori fungsi pemakaian bahasanya menurut teori Landry dan Bourhis. Data di atas memuat makna informasi yang menunjukkan tanda kepemilikan bahwa gedung Pasar Depok, Kota Surakarta merupakan instansi milik pemerintah. Sementara itu, makna simbolis yang dinampakkan adalah budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa merupakan simbol budaya Jawa yang menunjukkan bahwa gedung tersebut berada di sekitar masyarakat Jawa.

Adapun secara konfigurasi tata urutan, aksara Jawa diletakkan di atas bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penulisan Papan Nama Dengan Aksara Jawa Pada Bangunan Pemerintah Dan Nonpemerintah di Kota Surakarta. Akan tetapi, hal itu tidak sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan konfigurasi tata urut bahasa Indonesia—bahasa daerah—bahasa asing.

Sementara itu, konfigurasi ukuran yang digunakan menunjukkan bahwa penggunaan aksara Jawa lebih besar dibandingkan bahasa Indonesia. Hal itu semakin mempertegas kurangnya wujud pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

SMK Negeri 4 Surakarta



Gambar 3 Papan Nama SMK Negeri 4 Surakarta

Bahasa yang digunakan pada penanda di SMK Negeri 4 Surakarta adalah monolingual bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf latin disertai dengan aksara Jawa. Berdasarkan fungsinya data yang didapatkan dianalisis berdasarkan kategori fungsi pemakaian bahasanya menurut teori Landry dan Bourhis. Data di atas memuat makna informasi yang menunjukkan tanda kepemilikan bahwa gedung SMK Negeri 4 Surakarta merupakan instansi milik pemerintah. Sementara itu, makna simbolis yang dinampakkan adalah budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa merupakan simbol budaya Jawa yang menunjukkan bahwa gedung tersebut berada di sekitar masyarakat Jawa.

Adapun secara konfigurasi tata urutan, aksara Jawa diletakkan di atas bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penulisan Papan Nama Dengan Aksara Jawa Pada Bangunan Pemerintah Dan Nonpemerintah di Kota Surakarta. Akan tetapi, hal itu tidak sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan konfigurasi tata urut bahasa Indonesia—bahasa daerah—bahasa asing. Sementara itu, konfigurasi ukuran yang digunakan menunjukkan bahwa penggunaan aksara Jawa lebih besar dibandingkan bahasa Indonesia. Hal itu semakin mempertegas kurangnya wujud pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta



Gambar 4 Papan Nama Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta

Data di atas menunjukkan bentuk pemakaian bahasa monolingual. Bahasa yang digunakan pada penanda di Dinas Pekerjaan Umum, Kota Surakarta adalah bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf latin disertai dengan aksara Jawa. Berdasarkan fungsinya data yang didapatkan dianalisis berdasarkan kategori fungsi pemakaian bahasanya menurut teori Landry dan Bourhis. Data di atas memuat makna informasi yang menunjukkan tanda kepemilikan bahwa gedung Dinas Pekerjaan Umum, Kota Surakarta merupakan instansi milik pemerintah. Sementara itu, makna simbolis yang dinampakkan adalah budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa merupakan simbol budaya Jawa yang menunjukkan bahwa gedung tersebut berada di sekitar masyarakat Jawa.

Adapun secara konfigurasi tata urutan, aksara Jawa diletakkan di atas bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penulisan Papan Nama Dengan Aksara Jawa Pada Bangunan Pemerintah Dan Nonpemerintah di Kota Surakarta. Akan tetapi, hal itu tidak sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan konfigurasi tata urut bahasa Indonesia—bahasa daerah—bahasa asing. Sementara itu, konfigurasi ukuran yang digunakan menunjukkan bahwa penggunaan aksara Jawa lebih besar dibandingkan bahasa Indonesia. Hal itu semakin mempertegas kurangnya wujud pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik.

Kantor Kelurahan Pasarkliwon



Gambar 5 Papan Nama Kantor Kelurahan Pasarkliwon

Data di atas menunjukkan bentuk pemakaian bahasa monolingual. Bahasa yang digunakan pada penanda di Kantor Kelurahan Pasar Kliwon, Kota Surakarta adalah bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf latin disertai dengan aksara Jawa. Berdasarkan fungsinya data yang didapatkan dianalisis berdasarkan kategori fungsi pemakaian bahasanya menurut teori Landry dan Bourhis. Data di atas memuat makna informasi yang menunjukkan tanda kepemilikan bahwa gedung Kelurahan Pasar Kliwon Surakarta merupakan instansi milik pemerintah. Sementara itu, makna simbolis yang dinampakkan adalah budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa merupakan simbol budaya Jawa yang menunjukkan bahwa gedung tersebut berada di sekitar masyarakat Jawa.

Adapun secara konfigurasi tata urutan, aksara Jawa diletakkan di atas bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2008 yang mengatur tentang Penulisan Papan Nama Dengan Aksara Jawa Pada Bangunan Pemerintah Dan Nonpemerintah di Kota Surakarta. Akan tetapi, hal itu tidak sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan konfigurasi tata urut bahasa Indonesia—bahasa daerah—bahasa asing.

Papan Nama Jalan di Kota Surakarta

Dalam penelitian ini, papan nama jalan yang disajikan adalah papan nama di Jalan Brigjend Slamet Riyadi dan Jalan Gotong Royong. Data-data tersebut akan dibahas pada penjelasan berikut ini.

Jalan Brigjend Slamet Riyadi



Gambar 5 Papan Nama Jalan Brigjend Slamet Riyadi

Data di atas menunjukkan bentuk pemakaian bahasa monolingual. Bahasa yang digunakan pada penanda jalan di Jalan Brigjend Slamet Riyadi, Kota Surakarta tersebut adalah bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf latin disertai dengan aksara Jawa. Berdasarkan fungsinya data yang didapatkan dianalisis berdasarkan kategori fungsi pemakaian bahasanya menurut teori Landry dan Bourhis. Data di atas memuat makna informasi yang menunjukkan tanda kepemilikan bahwa penanda tersebut merupakan papan yang menunjukkan kawasan jalan sepanjang Stasiun Purwosari—Bundaran Gladak. Sementara itu, makna simbolis yang dinampakkan adalah budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa merupakan simbol budaya Jawa yang menunjukkan bahwa jalan tersebut berada di sekitar masyarakat Jawa.

Adapun secara konfigurasi tata urutan, bahasa Indonesia diletakkan di atas bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009. Dengan demikian, hal itu sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan konfigurasi tata urut bahasa Indonesia—bahasa daerah—bahasa asing.

Jalan Gotong Royong



Gambar 5 Papan Nama Jalan Gotong Royong

Data di atas menunjukkan bentuk pemakaian bahasa monolingual. Bahasa yang digunakan pada penanda jalan di Jalan Gotong Royong, Kota Surakarta tersebut adalah bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf latin disertai dengan aksara Jawa. Berdasarkan fungsinya data yang didapatkan dianalisis berdasarkan kategori fungsi pemakaian bahasanya menurut teori Landry dan Bourhis. Data di atas memuat makna informasi yang menunjukkan tanda kepemilikan bahwa penanda tersebut merupakan papan yang menunjukkan kawasan jalan sepanjang Apotek San Farma—Kantor Kelurahan Sewu. Sementara itu, makna simbolis yang dinampakkan adalah budaya Jawa. Penggunaan bahasa Jawa merupakan simbol budaya Jawa yang menunjukkan bahwa jalan tersebut berada di sekitar masyarakat Jawa.

Adapun secara konfigurasi tata urutan, bahasa Indonesia diletakkan di atas bahasa Indonesia. Hal itu sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009. Dengan demikian, hal itu sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 yang mewajibkan konfigurasi tata urutan bahasa Indonesia—bahasa daerah—bahasa asing.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 belum dilaksanakan sepenuhnya di Kota Surakarta. Hal itu tecermin dalam lanskap linguistik pada papan nama gedung instansi pemerintahan yang menggunakan aksara Jawa sebagai pendukung penamaan bahasa Indonesia. Papan nama gedung instansi pemerintahan di Kota Surakarta mengacu pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penulisan Papan Nama Dengan Aksara Jawa Pada Bangunan Pemerintah Dan Nonpemerintah di Kota Surakarta. Namun, Perwali tersebut mewajibkan penggunaan aksara Jawa berada di atas bahasa Indonesia secara konfigurasi posisi dan berukuran lebih besar secara konfigurasi ukuran. Hal itu jelas tidak sesuai dengan prinsip pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik yang menempatkan bahasa Indonesia pada konfigurasi posisi di paling atas dan ukuran yang paling besar. Sementara itu, papan nama jalan di Kota Surakarta telah menunjukkan pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2009. Papan nama jalan di Kota Surakarta merupakan papan monolingual bahasa Indonesia yang dilengkapi dengan aksara Jawa. Pengutamaan bahasa Indonesia pada papan nama jalan ditunjukkan dengan adanya konfigurasi posisi bahasa Indonesia yang terletak di paling atas dan ukuran yang paling besar dibandingkan dengan aksara Jawa.

REFERENSI

- Ardhian, D., & Soemarlum, S. (2018). Mengenal kajian lanskap linguistik dan upaya penataannya dalam ruang-ruang publik di Indonesia. *Jurnal Akrah Juara*, 3(3), 170–181.
- Blommaert, J. (2013). *Ethnography, superdiversity and linguistic landscapes: Chronicles of complexity*. Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781783090419>
- Cenoz, J., & Gorter, D. (2008). Knowledge about language and linguistic landscape. Dalam N. H. Hornberger (Ed.), *Encyclopaedia of language and education* (Vol. 6, pp. 22). Springer.
- Gorter, D. (2006). *Linguistic landscape: A new approach to multilingualism*. Multilingual Matters Ltd. <https://doi.org/10.21832/9781853599170>

- Landry, R., & Bourhis, R. Y. (1997). Linguistic landscape and ethnolinguistic vitality: An empirical study. *Journal of Language and Social Psychology*, 16(1), 23–49. <https://doi.org/10.1177/0261927X970161002>
- Lou, J. J. (2016). [Ulasan buku] Jan Blommaert, Ethnography, superdiversity and linguistic landscapes: Chronicles of complexity. *Language in Society*, 45(3), 478–480. <https://doi.org/10.1017/S004740451600035X>
- Moleong, L. (2009). *Metode penelitian kualitatif*. RemajaRosdakarya.
- Rejeki, M. R. S. S. (2022). *Lanskap linguistik pada papan nama gedung instansi pemerintah di Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta*. [Skripsi, Universitas Sebelas Maret].
- Sahril, S., Harahap, S. Z., & Hermanto, A. B. (2019). Lanskap linguistik Kota Medan: Kajian onomastika, semiotika, dan spasial. *MEDAN MAKNA: Jurnal Ilmu Kebahasaan dan Kesastraan*, 17(2), 195–208. <https://doi.org/10.26499/mm.v17i2.2141>
- Shohamy, E., & Gorter, D. (Eds.). (2009). *Linguistic landscape: Expanding the scenery*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203930960>
- Widiyanto, G. (2019). Lanskap linguistik di Museum Radya Pustaka Surakarta. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)* (Vol. 1, pp. 255–262). <https://jurnal.uns.ac.id/prosidingsemantiks/article/view/39023>
- Zaim, M. (2014). *Metode penelitian bahasa: Pendekatan struktural*. FBS UNP Press.
- Zaman, S. (n.d.). Lanskap linguistik kawasan Kota Tua Jakarta: Kajian sikap bahasa. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Linguistik dan Sastra (SEMANTIKS)* (Vol. 3, pp. 666–673).